

# Harapan Angin Perubahaan dari Dewan Perwakilan Daerah

Meski belum maksimal, otonomi daerah harus berjalan. Pemda yang kolaboratif, dengan peran para anggota DPD yang lebih kuat, bisa jadi solusi untuk otonomi daerah yang dicita-citakan.

Hampir tiga dekade otonomi daerah berjalan, gambaran kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah saat ini jauh dari yang dibayangkan para pemikir otonomi daerah di awal reformasi dahulu. Otonomi daerah telah salah arah.

Dari diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan Kompas berkolaborasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 4 Juli 2024 lalu, sejumlah indikator menyimpulkan hal demikian.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), banyak kinerja pemerintahan yang masih stagnan, bahkan menurun. Mengacu pada evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 17 indikator pembangunan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa di antaranya terkait dengan ketimpangan rasio gini yang tinggi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, pertumbuhan investasi yang rendah, atau tingkat inflasi yang juga tinggi.

Berdasarkan survei persepsi masyarakat pun, masih banyak indikator yang belum sesuai dengan target. Selain soal kemiskinan dan pengangguran, hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kemudahan akses pangan, peningkatan kualitas manusia melalui kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dasar. Ada juga soal penguatan sistem anti-korupsi dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Pemerintah daerah juga dinilai belum merata melakukan inovasi dalam memaksimalkan potensi lokal. Pemerintahan daerah yang inovatif terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia, terutama Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sementara kawasan timur Indonesia masih tergolong kurang inovatif.

Kondisi ini membuat ketertarikan daerah terhadap dana transfer dari pusat menjadi tinggi meskipun kecenderungannya saat ini menurun menjadi di bawah 70 persen dari total penerimaan daerah.

Pemerintahan yang koruptif juga mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama periode 2004-2023 terdapat 25 kepala daerah level gubernur yang tersangkut kasus korupsi. Sementara kepala daerah level wali kota/bupati dan wakil sebanyak 163 kasus.

Rapor merah pembangunan daerah ini tidak lantas membuat otonomi daerah harus dihentikan. Harus dicari pendekatan dan solusi untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah yang menyimpang dari target.

## Peluang koreksi

Tren tata kelola yang mulai bergeser menjadi pemerintahan daerah yang kolaboratif (*local collaborative governance*) bi-

## JAJAK PENDAPAT Litbang Kompas

sa menjadi pintu peluang untuk mengoreksi otonomi daerah. Konsep yang digagas oleh Ansell and Gash (2007) ini merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan secara bersamaan dalam sebuah forum untuk membuat keputusan bersama. Pemda tidak lagi menjadi satu-satunya konseptor kebijakan dan program daerah.

Dalam sistem ini, pemda bekerja sama dengan masyarakat, organisasi swasta, organisasi nonprofut, akademisi, media, dan berbagai *helix* atau aktor lain untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan program dan kegiatan, serta perbaikan kualitas masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan dan politik di negara kita, salah satu aktor yang dapat dilibatkan dalam pemerintahan daerah yang kolaboratif adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau para senator. Hal ini relevan karena para senator dipilih langsung oleh rakyat dan bebas kepentingan karena bukan wakil partai politik.

Bagi para senator, kolaborasi dengan pemda juga merupakan pintu peluang bagi mereka untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan mereka. Fungsi yang tidak berbeda dengan anggota DPR yang merupakan wakil partai politik.

Lembaga DPD ada sejak awal reformasi. Eksistensinya muncul tidak lama berselang dengan otonomi daerah. Namun, selama ini, kiprah para senator seakan tenggelam dalam hiruk-pikuk para legislator (DPR).

Mesti diakui, di atas kertas, peran senator tampak ideal. Berdasarkan UUD 1945, DPD mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

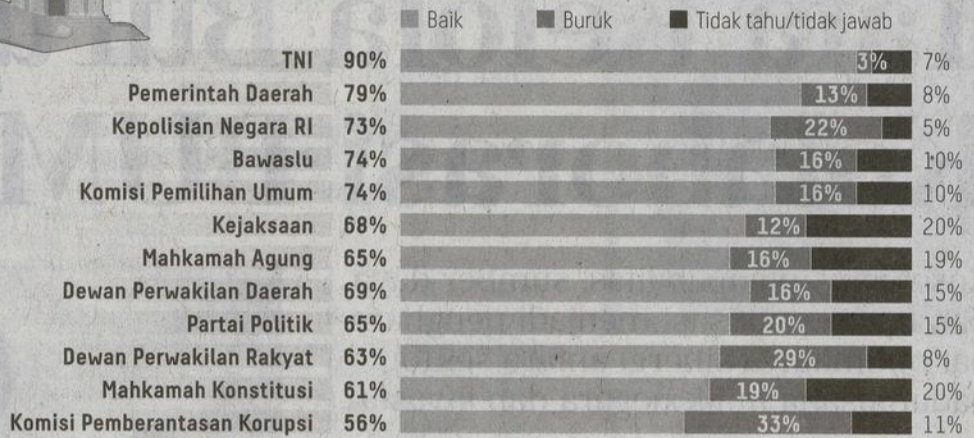
## Tuntutan jadi katalisator

Namun, posisi DPD belum seideal yang diharapkan. Kedudukannya belum dianggap setara dengan DPR. Kondisi ini menjadi polemik berkepanjangan dan membuat DPD menjadi berjarak dengan konstituentnya di daerah.

Ada keinginan untuk menata kembali sistem bernegara dengan memberi kewenangan

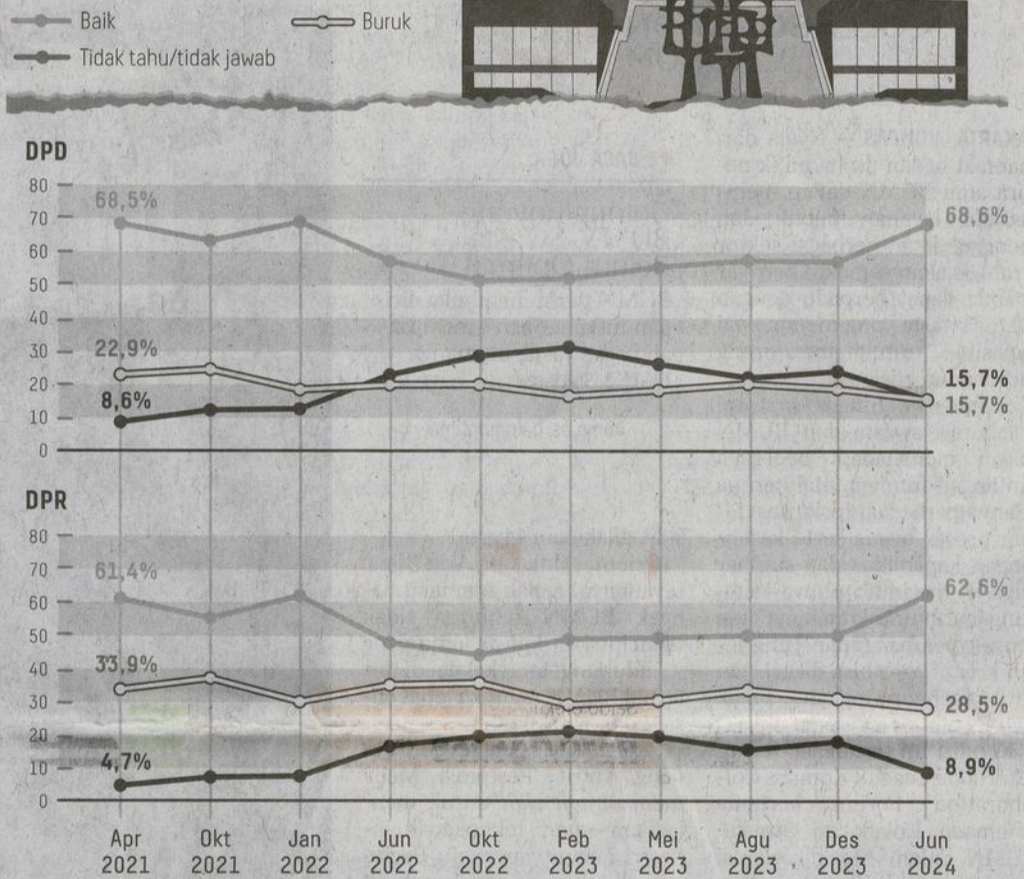


## Citra Lembaga



## Tren Citra Lembaga DPD dan DPR

(persen)



## Metode Penelitian:

Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas sejak April 2021 hingga Juni 2024. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sumber: Litbang Kompas/RFC/GI

yang lebih baik untuk DPD sehingga *checks and balances* bisa dilakukan. Namun, terlepas dari hal tersebut, ke depan, kiprah senator harus fokus mengurus daerahnya dalam bingkai tata kelola yang kolaboratif.

Senator harus menjadi katalisator bagi kemajuan daerahnya. Juga berperan sebagai mediator saat terjadi konflik, misalnya. Atau menjadi promotor untuk meningkatkan investasi dan kemajuan daerah. Serta menjadi evaluator atau pengawas terhadap kebijakan dan program pemda.

Dalam berkolaborasi dengan pemda, senator dituntut lebih aktif untuk menerima aspirasi masyarakat daerah dan mem-

perjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Senator harus menipukan angin perubahan pada periode yang akan dimulai Oktober nanti.

Senator memiliki modal sosial yang lebih baik untuk melakukan perubahan bukan semata karena ia bukan wakil partai politik. Citranya di mata publik pun lebih baik dibandingkan dengan banyak lembaga negara yang lain, termasuk DPR.

Hasil survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas pada Juni 2024 menunjukkan, citra baik lembaga DPD berada di level 68,6 persen, naik 11,4 persen dibandingkan dengan periode Desember 2023. Tren cit-

ra baik lembaga DPD ini terus meningkat sejak Oktober 2022.

Citra lembaga DPD ini lebih tinggi dibandingkan dengan citra baik DPR yang berada di level 62,6 persen (Juni 2024), yang juga mengalami kenaikan sebesar 12,1 persen dibandingkan dengan periode Desember 2023.

Senator yang kolaboratif dengan pemda dan menjadi angin perubahan bagi daerahnya sesungguhnya tengah membangun pintu peluang untuk masa depan. Lembaga DPD sejatinya menjadi wadah untuk menggodok calon pemimpin negara yang berkualitas.

(GLANIE/LITBANG KOMPAS)